

AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA

Marlia Asmarani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
liaasmarani97@gmail.com

Rohmawati Kusumaningtias

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
rkn.tias@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to determine the accountability of the amil zakat institution (LAZ) Al Falah Social Fund Foundation (YDSF). The research method uses a qualitative phenomenological approach. The data in this study were obtained through direct and indirect interviews with informants directly related to the object of research, namely LAZ YDSF. The results showed that accountability practices were carried out as they should. Shariah Enterprise Theory (SET) analysis on YDSF's accountability has an understanding of the aspects of *hablumminallah* or vertical accountability that can be seen from a spiritual dimension. In the aspect of *hablumminannas* or horizontal accountability can be seen from two dimensions namely, program accountability, and finance. This study also illustrates the practices and forms of accountability in accordance with applicable regulatory standards in accordance with Maqashid Syariah as seen from sharia regulations and positive law namely Al-quran, As-sunnah, PSAK 109 and government regulations.*

Keyword: *Accountability Dimension; Maqashid Syariah; shariah enterprise theory*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problem sosial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47% turun menjadi 13,20% pada Maret 2018. Sedangkan persentase penduduk miskin daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26% dan turun menjadi 7,02% pada Maret 2018.

Salah satu untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah adanya instrumen syariah yakni zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Adanya kesadaran berzakat dan dana tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dana zakat akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. ZIS juga bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dana zakat yang mampu meningkatkan kehidupan sosial dan tercapainya pertumbuhan ekonomi (Suprayitno et al, 2017). Hal ini sesuai yang diungkapkan Nugraha, (2017) bahwa zakat mempunyai dampak dalam tiga bidang yakni bidang sosial, ekonomi, dan moral. Pertama, bidang sosial berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Kedua, bidang ekonomi sebagai pencegahan penumpukan kekayaan. Ketiga, dalam bidang moral zakat berperan untuk menghilangkan ketamakan.

Fungsi tersebut telah dibuktikan di Barat dalam konsep *sharing economic* untuk mengatasi permasalahan resesi ekonomi dan hasilnya mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (Beik, 2009). Indonesia seharusnya juga harus bisa mengoptimalkan ZIS sebagai bentuk *sharing economic* yang diyakini memiliki dampak positif.

Pada penelitian BAZNAZ dan IPB (2011) mengungkapkan potensi zakat secara nasional sebesar 217 triliun tetapi realisasi hanya 1,7 triliun atau sebesar (7,8 persen). Selain itu, tahun 2011 hingga 2015 besaran penerimaan dana zakat rata-rata masih kurang dari 1% karena sebagian besar masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk menyalurkan zakat langsung kepada muzzaki (Canggih et al, 2017). Sedangkan potensi zakat 2018 Seperti yang dilansir laman *okezone* masih pada tahap 217 triliun.

Dengan melihat kondisi di atas pada September 2018 Forum Organisasi Zakat (FOZ) menyelenggarakan Indonesia zakat *Summit* guna mencetuskan gerakan zakat supaya mampu menyesuaikan era revolusi industri 4.0. Selain itu diharapkan lembaga-lembaga zakat harus membangun jaringan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi agar dapat menjangkau pembayar zakat (Sapingi et al, 2016).

Saat ini lembaga amil zakat (LAZ) merupakan mitra pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dana zakat. Di sisi lain LAZ juga menjadi bagian filantropi pembangunan umat untuk pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*). Hal ini dibuktikan oleh hasil riset CAF *World Giving Index*. Salah satu yang menjadi indikator penilaian adalah berkembangnya organisasi pengelola zakat, maka sudah sewajarnya diperlukan peran organisasi pengelola zakat kabupaten, provinsi atau kota, dan tokoh-tokoh zakat menjadi hal penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dari lembaga zakat.

Keberadaan LAZ bukan hanya untuk memaksimalkan profit. LAZ sebagai pelopor untuk berperan aktif dalam penghapusan kemiskinan, berkontribusi pada kesejahteraan sosial, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menjalankan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sosial dan ekonomi (Amaroh, 2008).

Dukungan regulasi yang mengatur pengelolaan ZIS baik LAZ maupun BAZNAS diatur oleh Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 dan PP No.14 Tahun 2011. Sementara Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi ZIS yang dikeluarkan pada 1 Januari 2009. Keterkaitan PSAK 109 dengan UU No 23 Tahun 2011 dan PP No.14 adalah kesesuaian dalam pengelolaan dana ZIS yang harus transparan dan akuntabel. Meskipun peraturan tersebut sudah dilengkapi dengan hukum syariah. Namun dalam pelaksanaannya masih adanya kesenjangan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan ZIS adalah: pertama, mobilisasi ZIS dengan *fund raising* untuk mempengaruhi masyarakat agar menyerahkan ZIS ke Organisasi Pengelola Zakat. Kedua, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait syarat dan hukum zakat. Ketiga, penyediaan SDM Amil yang profesional. Keempat, LAZ membuat laporan keuangan yang akuntabel (Nikmatuniayah, 2014; Rifai1, 2014).

Keempat program tersebut menunjukkan perlu adanya akuntabilitas dalam LAZ. Pengelolaan zakat bukan hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga dari lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. LAZ merupakan salah satu NGO (*Non Government Organization*). Fikri et al (2010), mengungkapkan bahwa NGO masih banyak kelemahan yang disebabkan rendahnya penyampaian informasi yang diberikan kepada khalayak umum.

Penelitian terkait akuntabilitas NGO keagamaan juga pernah diteliti oleh Huda, *et al.* (2013), Kalbarin (2014), Hudori *et al.* (2014), dan Salle (2015). Huda *et al.* (2013), mengungkapkan penelitiannya tentang akuntabilitas LAZ dengan *Action Research Method*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas zakat, harus berkolaborasi dengan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), IKADI (Ikatan Dai Indonesia) dan penyiapan profesi amil dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kalbarin (2014) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada Allah melalui dana zakat dan pertanggungjawaban kepada manusia dalam kehidupan sosial, karena akuntabilitas pengelolaan zakat yang sesuai akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZ maupun individu. Hudori et al, (2014) dalam penelitiannya tentang akuntabilitas NGO pada lembaga wakaf yang mengungkapkan bahwasannya akuntabilitas menjadi sebuah solusi untuk peningkatan profesionalitas SDM. Sedangkan akuntabilitas NGO pada LAZ Manutangi memaknai adanya peningkatan akuntabilitas dilihat dari tiga unsur yakni ketegasan, tawakal dan kesabaran (Salle, 2015).

Di sisi lain akuntabilitas dalam konteks syariah merupakan salah satu pokok dalam prinsip ketauhidan. Berdasarkan konsep ini, seseorang harus mematuhi persyaratan Islam dalam setiap aspek kehidupannya termasuk kegiatan agama, politik, sosial, dan ekonomi untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Secara umum, muslim percaya bahwa mereka bukan hanya bertanggung jawab pada sesama manusia yang merefleksikan akuntabilitas horizontal, tetapi juga kepada Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi (akuntabilitas vertikal). Seperti difirmankan dalam Surah Al Baqarah ayat 30: “*Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi*”.

Maksud ayat di atas menjelaskan tentang *Khalifah fil Ardhi* yang identik dengan sebuah kepercayaan untuk menjalankan tugas sesuai dengan yang menjadi kewajibannya. Doktrin tersebut diharapkan menumbuhkan sifat amanah bagi masing-masing individu (Endahwati, 2014). Sehingga setiap individu memiliki akuntabilitas tinggi yang berdampak pada motivasi tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Salah satu indikator keberhasilan akuntabilitas LAZ adalah dengan konsep *Maqashid Syariah* (Finarti, 2015). Perspektif *Maqashid syariah* menjelaskan bahwa adanya tujuan syariah yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukumNya (Qardhawi, 2007). *Maqashid syariah* adalah keseluruhan produk Islam yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan meminimalisir kemudharatan (Usman, 2015:95). Paramater *Maqashid Shariah* ada lima macam yaitu perlindungan terhadap agama

(*Hifdzu ad-din*), Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdzu ad-nafs*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifdzu an-nasl*), perlindungan terhadap harta (*Hifdzu al mal*) dan perlindungan terhadap akal (*Hifdzu al-Aql*). Para pelaku ekonomi Islam seharusnya menggunakan *Maqashid Syariah* untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan menjadi acuan yang akurat khususnya pada lembaga amil zakat.

Hal ini dikarenakan LAZ memuat dimensi spritual dengan prinsip *maslahah*. Dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas terutama yang kurang mampu, sehingga *Maqashid Syariah* diharapkan menjadi indikator analisis untuk mengatasi segala permasalahan yang mampu meningkatkan pengelolaan, perencanaan, dan pertanggungjawaban dana ZIS yang lebih produktif.

Dengan melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji akuntabilitas dan ingin melakukan penelitian pada LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). YDSF merupakan salah satu LAZ yang tertua di Surabaya Jawa Timur. Selain itu, dilihat dari aspek keuangan YDSF mendapat akreditasi dan Audit Syariah dari Kementerian Agama RI mendapatkan nilai A dengan nilai kepatuhan syariah 98.11. Keadaan YDSF yang memiliki jumlah donatur sebanyak 88.449 dan hal itu berhubungan pengelolaan dana ZIS pun juga tinggi. Sehingga diperlukan akuntabilitas yang sesuai dengan dimensi spritual yakni *Maqashid Syariah*. Sebab adanya akuntabilitas menjadi kebutuhan setiap OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), jika tetap ingin mendapatkan kepercayaan publik dalam meningkatkan pengumpulan potensi zakat. Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat mengeksplorasi pemahaman praktik dan wujud akuntabilitas yang dipraktikkan LAZ YDSF, serta kesesuaian peraturan yang berlaku. Namun hasil kesimpulan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

KAJIAN PUSTAKA

Shariah Enterprise Theory

Teori ini digunakan untuk sistem yang berdasar pada nilai syariah, karena menekankan pada akuntabilitas yang luas. Triwuyono (2007:2) merekomendasikan keuangan ekonomi berbasis syariah, alasannya syariah menghimbau agar kekayaan tidak beredar pada kalangan tertentu saja.

Impementasi teori ini berhubungan dengan pengelolaan aktivitas dana ZIS oleh LAZ YDSF sebagai organisasi pengelola zakat. Sebab kegiatan yang dilakukan oleh LAZ berdasar pada nilai-nilai syariat Islam yang melakukan akuntabilitas kepada Allah dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Maqashid Syariah

Menurut Usman (2015), ulama fiqh memiliki kesepakatan bahwa *maqashid syariah* menjadi pokok utama dalam berijtihad sebagai solusi terkait problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid syariah* yaitu tujuan dan hikmah yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumNya. Inti dari *maqashid syariah* adalah sebuah kemaslahatan. Menurut imam Al Syatibi lima aspek kehidupan dalam pokok *maqashid syariah* adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima, memelihara harta benda dengan yang disyariatkan oleh hukum Islam.

Akuntabilitas

Menurut Silvia et al. (2011) akuntabilitas merupakan sebuah perwujudan kewajiban-kewajiban yang diberikan untuk melakukan pertanggungjawaban kemajuan atau kegagalan dan mengungkapkan realisasi otoritas yang diperoleh sebagaimana dengan tujuan organisasi. Akuntabilitas dan akuntansi tidak dapat dipisahkan, sebab akuntansi merupakan tolak ukur untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma intepetif fenomenologi. Studi fenomenologi secara etimologis berasal dari kata *phi-nomena* dan *logos*. *Phinomena* berarti terkait realitas sosial yang berdasarkan atas pemahaman dan keyakinan dari subjek yang bersangkutan.

Menurut Husserl, (2004 39) ranah fenomenologi mementingkan makna, konteks, dan proses penelitian lebih mementingkan kedalaman dari pada cakupan penelitian yaitu memberikan gambaran mengenai akuntabilitas LAZ YDSF. Metode ini juga dipakai untuk memahami realitas sosial sebagai realitas

subyektif yang memberikan tekanan terbuka tentang kehidupan sosial, khususnya LAZ YDSF. Maka yang dilihat penting bukanlah pada soal jumlah atau angka-angka, melainkan kepada *what is* yang bersangkutan dengan LAZ YDSF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Spritual

Nilai Amanah

Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik menyangkut hak dirinya, orang lain, dan hak Allah SWT. Amanah inilah yang membuat karyawan YDSF berusaha menunaikan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pernyataan informan bagian penghimpunan, prinsip amanah menjadi landasan untuk melakukan dengan baik dan benar segala sesuatu yang dipercayakan padanya. Berdasarkan dengan *Jobdish* masing-masing divisi. Dalam konteks ini, berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban, jabatan yang dimiliki, dan kewenangan yang. Sebagai orang beriman amanah menjadi media pertanggungjawaban hakiki kepada Allah di akhirat kelak. Sebagaimana tertulis di surah Al Anfal ayat 27 *Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*. Di samping itu perwujudan nilai amanah dalam pengurus YDSF ditemukan peniliti berikut ini:

Ihsan

Ihsan adalah keutamaan dalam mengelola sesuatu dengan baik dan benar. Dalam menjalankan aktivitas pekerjaan, pengurus YDSF berusaha mempersembahkan perfoma terbaik dalam mengelola dana umat. Prinsip ini diyakini yang melahirkan sikap jujur dan kehati-hatian dalam penghimpunan maupun penyaluran. Berikut ungkapan bagian keuangan:

“Kita pasti selalu merasa **diawasi** Allah SWT. Apalagi kita bekerja di LAZ yang mana donatur sudah percaya untuk mengamanahkan menyalurkan dananya.”(Ibu Enik-bagian keuangan)

Berdasarkan pernyataan informan tersebut setiap aktivitas kehidupan tidak luput adanya pengawasan dari Tuhan. Seseorang yang diberi amanah harus melaksanakan kewajiban mengelola dana umat yang sebenarnya dan mampu mempertanggungjawabkan segala pekerjaannya. Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW: *Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu (HR. Muslim)*. Prinsip ini yang dapat mendorong setiap individu untuk bersungguh-sungguh tanpa harus diawasi atasan, karena ada keyakinan bahwa Allah SWT yang selalu mengawasi. Selain itu, dengan kesadaran insaniyah, maka akan melahirkan SDM yang jujur dan Islami dan mendorong tercapainya prestasi yang terbaik.

Ibadah

Bentuk akuntabilitas spritual YDSF adalah dengan adanya perilaku Islami yang ditampilkan dengan semangat beribadah. Nama lembaga Al Falah memang sudah tidak asing dan menjadi daya tarik di kalangan masyarakat Jawa Timur. Namun, tidak membuat lalai pengurus untuk tetap menjalankan amanahnya. Berikut penuturan informan yang berhasil diwawancara:

“Motivasi saya semangat dan Istiqomah dalam bekerja di YDSF atas dasar lingkungan kerja yang Islami, kesempatan bekerja sambil **beribadah**, dan kesempatan menambah ilmu sambil bekerja.” (Ibu Enik- Bagian Keuangan)

Berdasarkan pemaparan informan dalam konteks akuntabilitas yakni adanya motivasi bagi karyawan dalam semangat bekerja yang didorong dengan semangat beribadah. Pemaknaan ibadah bukan hanya pada ritual keagamaan, tetapi dalam segala aspek kehidupan, termasuk bekerja. Hal ini sesuai dengan surah Adz-Dzariat 56: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku.

Maksud dari ayat tersebut akan memberikan kosekuensi positif bagi manusia yang mentaati doktrin yang telah ditetapkan Allah SWT. Konsekuensi positif ini diasumsikan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai kendala serta memberikan ketenangan, dalam bekerja dan beraktivitas demi mengharapkan keridhoan Allah SWT. Sebab doktrin tersebut merupakan perintah yang diberikan Tuhan kepada hambaNYA.

Nilai Keikhlasan

Pemaknaan Ikhlas secara bahasa adalah mengamalkan perbuatan tanpa pamrih semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT. Sifat ikhlas harus menjadi prinsip hidup termasuk bekerja. Hal tersebut dilakukan pengurus YDSF dalam segala kondisi dan situasi. Mereka tetap menjalani dengan penuh keikhlasan. Berikut pernyataan Mbak Eta:

“Misalnya ada pengambilan diluar jam kerja **tanpa pandang bulu digaji berapa**. Karena beliau-beliau memiliki amanah untuk menyampaikan. Bahkan ada bantuan di daerah terpencil. Bisa sampai malam atau kadang dua hari ke daerah polosok dan jalan yang tidak bisa dilewati mobil.

Karyawan menerapkan sikap ikhlas dalam bekerja. Wujud keikhlasan tersebut bisa dilihat ketika mengemban amanah ke daerah yang sulit dijangkau yakni terpencil dan terdalam. Selain itu, adanya insentif atau tidak menjadi urusan kesekian yang terpenting amanah dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Bekerja menjadi tuntutan namun keberkahan menjadi pembeda ketika nilai keikhlasan terwujud pada setiap insan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 105: *Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas*. Selanjutnya, terkait nilai keikhlasan juga tampak dari sikap donatur. Persepsi ini ditemukan peneliti saat bincang advetorial YDSF bersama radio suara muslim berikut ini:

“Ada donatur yang ingin berdonasi **tidak usah dicatat**. Kemudian tidak mau ditagih. Tiba-tiba rekening masuk. Jumlahnya semakin banyak dan trennya sekarang itu memang orang berzakat dan infaq seperti amanah dari Rasulullah kalau bisa tangan kirinya tidak tahu.”

Berdasarkan pernyataan informan, ada kunikan cara donatur dalam beramal yakni memiliki keinginan *fasatabiqlukhoirot* dengan cara bersedekah tanpa menyebutkan nama dan untuk menjaga niat agar terhindar dari unsur riya. Sebab niat adalah salah satu ukuran keberhasilan yang bersifat abstrak. Hal itu bisa terlihat dari peningkatan ketakwaan dan hanya Allah SWT yang mengetahui. Sesuai surah Al Baqarah: 271 “Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik sekali. *Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir itu jauh lebih baik*.”

Nilai Ukhuwah

Al-Qur'an mengajarkan persaudaraan sesama manusia termasuk dalam perekonomian (Usman:2015). Pihak YDSF mengakui bahwa sebuah organisasi dapat berjalan jika adanya harmonisasi karyawan. Sinergi pengurus tersebut terbentuk tidak hanya terbatas dalam ranah kerja semata. Namun, saat menjalankan tugas tingkat jabatan bukan menjadi penghalang untuk bernegosiasi, karena adanya kesadaran sama-sama berjuang dalam kebaikan.

Berdasarkan pernyataan bagian SDM, pengurus memiliki rasa kekeluargaan dalam bekerja. Adanya persaudaraan tersebut mampu membentuk tim solid dalam menjalankan roda organisasi. Hal yang menarik lagi, karyawan diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan tanpa memandang adanya jabatan. Sebab segenap pengurus memandang setiap insan memiliki otoritas sama sebagai hamba Allah (abdullah). Sebagaimana firman Allah SWT: Allah swt tidak memandang harta, tahta, dan rupa tapi melihat hati hambanya. Dalam mencapai hal tersebut, peneliti menemukan dua prinsip dalam mencapai nilai ukhuwah tersebut yaitu *koperatif* dan *Falah*. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

Koperatif

YDSF mengedepankan kerjasama dengan semua lembaga Islam yang memiliki visi-misi yang serupa. Pihak YDSF menilai bahwa semua adalah mitra dan tidak ada persaingan dengan pihak lain. Bahkan, YDSF tetap Istiqomah dalam mengembangkan visi misi yang dengan mengadakan inovasi dan teladan LAZ lain dalam berbagai aspek. Berikut pernyataan Mbak Eta bagian SDM

“Sebenarnya sama LAZ manapun kita tujuannya sama untuk membantu. Kalau misalnya LAZ hanya YDSF saja pasti tidak bisa menampung. Jadi butuh lembaga lainnya juga kita lembaga tertua setelah YDSF sendiri. Intinya lembaga lain ada yang belajar dari YDSF seperti itu.”

Pernyataan tersebut juga ditemukan peneliti dari Direktur Dhompot Dhuafa pada dokumen YDSF:

“Tumbuh dan berkembang adalah hal biasa, tetapi membagi ilmu dan hikmah bagi lembaga dakwah yang lain itu yang luar biasa. YDSF lah guru kami.”

Berdasarkan ungkapan kedua informan tersebut, YDSF berhasil menjadi pionir gerakan zakat. YDSF juga berusaha berbagi pengalaman ilmu dan dapat menjadi teladan LAZ lain. Tujuannya untuk menumbuhkan ghairah LAZ agar semakin terasa kemanfaatannya. Sebagaimana sabda Rasul: sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat”.

Falah

Menurut Juhaya S. Praja (2012:6), bahwa sistem bisnis menempatkan Al Falah sebagai tujuannya. Al falah adalah kesejahteraan lahiriyah yang dibarengi kesejahteraan batiniah. Al Falah sebuah kemenangan yang menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Namun, ada hal menarik pemaknaan al falah di YDSF. Nama Al Falah memiliki atmosfer luar biasa untuk menarik semua kalangan khususnya masyarakat Jawa Timur. Seperti pernyataan berikut ini

“kita memakai nama al falah yang awalnya memang lahir dari **Masjid Al Falah...**”

Pernyataan yang disampaikan Pak khoirul tersebut juga ditemukan dilaporan majalah YDSF edisi sepuluh, berikut ini:

“Seandainya nama yayasan tidak menggunakan **Al Falah**, kami kira prestasi dan hasilnya tidak akan dapat mencapai seperti yang dicapai YDSF”

Berdasarkan pernyataan informan penggunaan kata Al Falah menunjukkan bahwa YDSF lahir dari Masjid Al Falah. Sehingga pelaksanaannya bersifat independen tidak terikat pada organisasi masyarakat maupun lembaga politik. YDSF lebih mengedepankan kolaborasi setiap elemen lembaga Islam yang sevisi misi. Hal ini mengedepankan prinsip ukhuwah Islamiyah yang menyatukan setiap elemen masyarakat baik dari komunitas maupun organisasi. Seperti ungkapan Rasullullah SAW:” Mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah meskipun diantara mereka tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak pula ada motivasi duniawi (HR. Abu daud).

Dari pembahasan nilai di atas menekankan bahwa konsep tanggungjawab bukan hanya pada hal materi saja untuk memenuhi harapan publik tapi sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT.

Akuntabilitas Program

Agama

Konsep menjaga agama adalah adanya beberapa program kegiatan. Pertama, bagi karyawan adanya pembekalan rohani menjalankan ibadah sunah secara istiqomah dan kajian. Sedangkan untuk donatur adanya kajian terbuka seperti kajian aktual Al Falah (KAFFAH), wisata dakwah kurban, gerakan sholat shubuh, dan pelayanan konsultasi agama. Kegiatan keagamaan ini diampu oleh pemateri yang ahli dibidangnya sesuai dengan Al qur'an dan Hadish.

Di sisi lain secara kasat mata dalam menjaga agama sudah dijalankan. Implementasi tersebut terlihat secara fisik. Para karyawan YDSF harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bagi kaum muslimah menggunakan jilbab yang sesuai syariat yakni menutup dada dan rok. Sedangkan yang laki-laki ada memelihara jenggot sebagai salah satu sunnah Rasullullah SAW dan tidak merokok.

Mardiasmo (2002) mengungkapkan kepatuhan terhadap aturan dapat dijadikan jaminan adanya akuntabilitas. Kepatuhan atau ketatatan terhadap agama secara personal membawa dampak terhadap kepatuhan secara sosial khususnya mampu menjadikan indikator YDSF sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola dana umat.

Jiwa

Dalam syariat Islam hak hidup atau jiwa adalah hal utama. Hak tersebut suci dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Berkaitan dengan hal tersebut, YDSF memiliki bidang garap kemanusiaan. Salah satu tujuannya adalah dapat mengoptimalkan dana ZIS dibidang kemanusiaan dan kemiskinan. Berdasarkan pernyataan Kepala Divisi Pendayagunaan tersebut adanya program KUM dapat memberdayakan mustahik. Selain itu, YDSF memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan memberikan modal tanpa riba. Dengan bantuan ini diharapkan masyarakat dapat membangun ekonomi

secara mandiri. YDSF memiliki kontribusi dalam program UAC bencana. Program ini sebagai langkah cepat untuk terjun langsung membantu korban bencana alam.

Berdasarkan pernyataan informan bantuan kemanusiaan bisa berupa pemberian dana dan *supporting* langsung dengan adanya relawan kemanusiaan. Bahkan fasilitas kesehatan juga diwadahi untuk membantu *mustahiq* yang membutuhkan. Fasilitas tersebut dapat dinikmati dengan *free*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah: 2”...Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa.

Akal

LAZ YDSF juga berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan program pemberdayaan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Menurut pernyataan informan bagian penghimpunan program pendidikan menjadi salah satu program unggulan. Karena bisa mewadahi keluarga muslim yang kurang mampu dengan beasiswa pena bangsa. Maka, pemberdayaan pendidikan dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan. Dengan demikian kegunaan akal dapat terpenuhi. Hal ini terbukti pada surat Al quran yang menyinggung kegunaan akal. Salah satunya di Surat Al Isra ayat 7.

Keturunan

Penjagaan terhadap keturunan merupakan jaminan kelestarian setiap umat manusia agar tetap berkembang hidup baik secara fisik maupun psikis (Finarti, 2015). Sehubungan hal tersebut YDSF memiliki program Syiar dakwah melalui pengiriman DAI ke pedalaman dan dapat menyalurkan bantuan dhuafa ke desa.

Program Dai pedesaan tersebut menetap, sehingga mereka benar-benar sudah memahami petanya. Bisa dilihat dari lingkungan maupun lokasi yang masih minim dalam hal agama. Seperti pernyataan Pak Ma'mun dalam bingkai *advetorial* bersama Radio Suara Muslim berikut ini:

“Kita ada dai pedesaan yang menetap sehingga sudah memahami peta lokasinya. Peta bagaimana yang fakir, yang miskin, yang gharim. **Kriteria desa** yang menjadi target adalah adanya sentuhan agama. Jadi ada yang waktu kita datang muslimnya hanya sedikit, Alhamdulillah sekarang kepala desanya sudah muslim.

Berdasarkan pernyataan informan, adanya DAI tidak hanya sebatas berdakwah saja, akan tetapi bisa memberikan jalan keluar dan pemberdayaan kepada masyarakat binaannya. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa aspek. Pertama, memberikan pencerahan kepada masyarakat dan solusi cerdas ditengah umat. Kedua, menjadi perekat kesatuan masyarakat dan mencegah hal yang munkar. Sebagaimana penelitian Finarti (2015) bahwa salah satu menjaga aspek keturunan adalah perhatian Islam terhadap fenomena yang terjadi.

Harta

LAZ YDSF bertransformasi dari segi dakwah, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan UU NO. 23 Tahun 2011 dan dapat merelevansikan dengan visi, misi, dan prinsip pengadaaan kegiatan YDSF. Seperti pernyataan Pak Machsun berikut ini:

“LAZ biasanya tidak hanya sekedar memberikan bantuan tapi mereka juga mendampingi dan mengedukasi memberikan pelatihan-pelatihan khususnya dalam bidang **ekonomi** agar bisa bangkit dan berdaya”.

Pernyataan diatas menginformasikan bahwa peran YDSF sangat penting untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. LAZ sebagai kelembagaan religius bukan hanya berkutik pada masalah keagamaan, tapi sudah masuk dalam ranah sosial ekonomi. Tujuannya dapat menjembatani LAZ dengan *stakeholder*, sehingga tidak ada kesenjangan antara orang yang kaya dan miskin. Hal ini dibuktikan YDSF dengan mengadakan program pemberdayaan *mustahiq* berupa bantuan modal usaha.

Berdasarkan pernyataan informan pengentasan kemiskinan bukan hanya pemberian uang tunai semata, tetapi dengan bantuan modal usaha. Salah satunya *mustahiq* dibuatkan rombongan supaya bisa mandiri dan menggerakkan ekonomi khususnya bagi *mustahiq* sendiri.

Dalam pembahasan di atas sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan.

Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Hasyr ayat 7: “*Supaya harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu*”

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dapat dinilai dengan pertanggungjawaban kepada dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari pihak eksternal (Indrarini *et al*, 2017). Jika dilihat dari sisi YDSF hal tersebut terlihat terkait pelaporan keuangan dan transparansi sebagai berikut:

Pelaporan Keuangan

Kepala Divisi Keuangan harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ZIS kepada BAZNAZ di setiap semester. Penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap tahun. Apabila laporan tidak sesuai dengan laporan yang telah ditetapkan bisa dikenakan sanksi.

Di sisi lain penyelesaian laporan keuangan harus sesuai target yakni setiap bulan tanggal sepuluh, Karena laporan keuangan harus dilaporkan ke pengurus terlebih dahulu melalui rapat pengurus. Rapat pengurus tersebut dilaksanakan setiap bulan dua kali. Berikut pernyataan Bu Enik:

“...kita sebagai lazna kita harus ada **kewajiban** laporan keuangan ke BAZNAS dan Kementerian Agama. Jadi kalau ke BAZNAS itu misalnya kita menyampaikan semester satu tanggal 15 Juli. Untuk laporan audit itu bulan Mei harus sudah diserahkan...”

Berdasarkan pernyataan Kadiv keuangan tersebut, setiap laporan keuangan harus dilakukan secara tertib. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Menurut Departemen Agama RI (2000: 5) dan Ula (2014:11) akuntabilitas keuangan berfokus pada integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Divisi keuangan memaknai akuntabilitas keuangan sebagai bentuk penyampaian kepada pemangku kepentingan. Adanya laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, sehingga donatur dapat mengetahui kondisi keuangan. Seperti pernyataan bagian divisi keuangan berikut ini:

“kita juga menerbitkan laporan keuangan dari situ bisa digunakan untuk menilai **kinerja ketercapaian** dari RA dan termasuk pengeluarannya juga untuk di kita itu. Selain kita bukan perusahaan *non profit* ya bisa lembaga sosial. Harus ada aturan-aturan tertentu dari standar akuntansi kalau di pengelola zakat kan PSAK 109 dan kita juga memperhatikan pedoman audit syariah seperti apa.”

Pemaknaan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban kepada donatur dan *stakeholder* lainnya. Selain sebagai media penghubung dengan *stakeholder*, laporan keuangan menjadi pengukur ketercapaian baik atau buruknya kondisi keuangan YDSF. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, divisi keuangan berpegang teguh pada prinsip standar akuntansi PSAK 109 dan pedoman syariah.

Laporan keuangan dengan proses audit menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban bagian keuangan kepada donatur. Prinsip amanah dan transparansi sesuai dengan Al-Baqarah 282: Hendaklah seorang penulis menulisnya dengan benar. Seperti penjelasan Bu Enik

Jadi selain kita setiap bulan mengkomunikasikan apa yang diamanahkan donatur kepada kita melalui majalah maupun laporan keuangannya. Sebagai bentuk **pertanggungjawaban** kita bahwa sesuai dengan visi kita amanah dan terpercaya”

Berdasarkan ungkapan divisi keuangan bahwa mereka memiliki prinsip sesuai surah Al Baqarah 282. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga kebenaran dalam setiap transaksi. Perintah ini menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan. Berdasarkan ayat tersebut Kepala Divisi keuangan berpendapat bahwa akuntabilitas keuangan dilakukan dengan memberikan laporan keuangan secara benar melalui laporan keuangan yang tersaji di berita maupun majalah.

Divisi keuangan memberikan laporan keuangan kepada donatur untuk menyediakan informasi yang relevan kepada anggotanya. Namun, laporan keuangan secara lengkap tidak di publish, sebab tampilan informasi pemasukan dan pengeluaran dirasa sudah cukup bagi *stakeholder*. Hal ini didukung oleh penjelasan Kadiv keuangan berikut ini:

Kepala divisi keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan yang ditujukan kepada donatur hanya hal yang baku. Tujuannya untuk memudahkan donatur dalam menerima informasi yang diberikan. Hal ini didukung oleh peraturan UU No. 23 Tahun 2011 yang tidak mewajibkan informasi secara keseluruhan. Selain itu, sebagai wujud akuntabilitas donatur adanya majalah dan juga media nasional seperti republika. Tujuannya adalah agar donatur dan *stakeholder* lainnya dapat mengetahui dengan jelas pemasukan dan pengeluaran dana. Selain menyampaikan dan melaporkan keuangan ada aspek yang harus dipenuhi LAZ yaitu relevansi, keandalan, tepat waktu, dan mudah dipahami. Hal didukung oleh pernyataan Ibu Enik berikut ini:

“Laporan keuangan yg sudah di audit dipublikasikan di media nasional, memberikan pelayanan donatur dari segi pelayanan penghimpunan atau penyaluran ,sebelum audit itu, kita menyerahkan laporan audit kemarin tanggal 28 februari harus menyerahkan ke BAZNAS. Kita buat *schedule* jangan sampai **kewajiban-kewajiban** kita ke negara terhambat.”

Berdasarkan pemaparan informan di atas laporan keuangan harus diserahkan ke BAZNAZ dan KEMENAG sebagai bentuk pertanggungjawaban LAZ kepada pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan YDSF adanya penyajian laporan keuangan yang berimplikasi secara vertikal dan horizontal. Fokus akuntabilitas dalam laporan keuangan diterbitkan secara tertib sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan telah dilakukan audit secara profesional. Akuntabilitas keuangan secara dilaporkan kepada pengurus dalam rapat dan kepada BAZNAS.

Transparansi

Transparansi laporan keuangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana LAZ dilakukan dengan baik. Transparansi perlu dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan. UU NO. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa LAZ wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada stakeholder. Transaksi penggunaan dana LAZ dilakukan dengan berbagai cara, seperti di Majalah al Falah yang dapat di peroleh di web YDSF.

Berikut hasil wawancara dengan Bu Enik selaku Kepala Divisi Keuangan transparansi laporan keuangan menjadi kewajiban yang harus disampaikan baik melalui media cetak maupun media sosial. Adanya transparansi memberikan kemudahan setiap elemen untuk mengetahui kinerja dan keberhasilan. Sebagaimana dalam sebuah Hadish: *Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban* (HR. Muslim)

KESIMPULAN

Akuntabilitas spritual sebagai cerminan dimensi vertikal yang terwujud dari *ghirah* karyawan YDSF untuk tetap amanah dan profesional dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang termaktub dalam Surah Ad-Dzariat ayat 56. Akuntabilitas program tercermin saat pelaksanaan program yang efektif dan efisien yang sesuai dengan pedoman kebijakan YDSF dan pihak yang berwenang terkait pelaksanaan kegiatan LAZ YDSF. Hal tersebut tercermin dari *maqashid syariah* yang lima yakni adanya program pembinaan agama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah di pedalaman, dan pengentasan kemiskinan. Wujud akuntabilitas keuangan sesuai dengan pedoman PSAK 109, UU No 11 tahun 2011 dan surat Al Baqarah 282. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, saran untuk peneliti berikutnya dapat meneliti seluruh aspek akuntabilitas pada LAZ. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif pada organisasi LAZ serta untuk memenuhi ketentuan LAZ sesuai dengan *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim, Al Hadish dan Terjemahnya.

Aan Finarti, Purnama Putra. 2015. Implementasi Maqashid Al- Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam : Studi Kasus Pada Pt.Bank Bri Syariah.” *Journal Universitas Islam Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 37–66.

Aibak, Kutbuddin. 2015. Maqashid Al-Syariah. *Journal AHKAM*, vol. 3, no. 2, pp. 199–218.

AL-Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah*. Edited by Lc Muslich Taman, Pustaka Al-Kautsar.

Al Ghazi, Muammad bin qasim. Tanpa Tahun. *Al Fat-hu Qorib Jilid 1*. Terjemahan oleh Achmad Sunarto. Surabaya: Al hidayah.

- Ant. 2018. Potensi Zakat Secara Nasional, (online) (<https://economy.okezone.com/topic/2160/zakat> diakses 2 April 2019).
- Aziz. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- BAZNAZ. 2011. Laporan Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional 2011. Jakarta:BAZNAZ.
- Beik. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, vol. 2, no.1, pp. 3.
- BPS. 2018. Kependudukan. (online), (www.bps.co.id, diakses tanggal 28 Maret 2019).
- Canggih, Clarashinta, et al. 2017. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economic*, vol. 1, pp. 14–26.
- Departemen Agama RI. 2006. *Akuntabilitas dan Good Governance. Dalam Afila Nurlaily Ula* (Ed), *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban* (hlm.5). Malang: FE Universitas Negeri Malang.
- Djuanda, Gustian dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Endahwati, Dian. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), vol.1, no.2, pp.1356–1379.
- Huda, Nurul, et al. 2013. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol.4, no.3, pp.1-13.
- Hudori, N. H. D. A. N. R., & Mardoni, Y. 2014. Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 5, no.3, pp. 12.
- Husserl. 2004. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Widya Padjajaran.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta:Tiara Wacana Yogyakarta.
- Indrarini, Rachma, & Nanda, A. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: PERSPEKTIF MUZAKI UPZ BNI SYARIAH. *Jurnal Akruak*, vol.8, No.2,
- Intan. 2018. Jiwa sosial masyarakat juga tinggi, (Online) (<https://www.republika.co.id>), diakses 6 Mei 2019)
- Juhaya S. Praja,2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kalbarin, N. S. 2014. Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis. *Jurnal JESTT*, vol.1, no.7, pp.506–517.
- Mahmudi. 2008. Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting (Online), (<http://idb2.wikispaces.com>, diakses 21 Maret 2019).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad. 2005. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Mutiah, m., & Harwida, A. (Ed). (2011). Interpretasi Pajak dan Implikasi menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Studi Interpretif. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.
- Nugraha. 2017. Kontribusi Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian SDGs. *Journal Rumah Zakat*, vol.1, no.1, pp. 3-9.
- Nur Barizah Abu Bakar, et al. 2007. "A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation." *Journal KAU: Islamic Econ*, vol. 20 no.1, pp. 25-40.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Patlima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2011. UU No. 23/2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI.
- Republik Indonesia. 2014. PP No. 14/2014 *Tentang Pelaksanaan UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat*. Jakarta: Menti Hukum dan HAM RI.
- Rifai, A. 2014. Pengelolaan Zakat Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Ummat. *Jurnal PMI*, vol. XII, no. 1, pp. 53-66
- Rilis FOZ. 2018. Indonesia Zakat Summit, (Online) (<https://suaramuslim.net/indonesia-zakat-summit-2018-upaya-menjaga-momentum-perjuangan-gerakan-zakat-indonesia>, diakses 8 Oktober 2018)
- R Suprayitno, Aslam, H. 2017. Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of. *International Journal of Zakat*, vol.2, no1, pp.61–69

-
- Silvia, Janets, et al. 2011. Studi Fenomenologis Pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu. *Simposium Nasional Akuntansi XIV ACEH*, vol.14, no.9, pp. 21–22.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Kesepuluh, Bandung:Alfabeta.
- Triwuyono. 2006. *Akuntansi Syariah*. (O. 2015, Ed.). Malang: PT. Rajagrafindo Persada.
- Usman, A. H. 2015. *Manajemen Strategi Syariah*. (S. Patria, Ed.) (Cetakan ke). Jakarta: Zikrul Hakim.